

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia menjadi isu yang membutuhkan perhatian penuh internasional. Isu tersebut merupakan salah satu kejahatan lintas batas negara yang masih mengakar dan berkepanjangan hingga saat ini. Dengan buramnya batas-batas yang dimiliki oleh setiap negara-negara akibat globalisasi, menjadi pendorong dalam terjadinya kejahatan lintas batas negara. Karena akan menghambat tindakan penyelidikan dan penuntutan bagi pelaku kejahatan transnasional terorganisir. UNODC memberikan perhatian penuh mengenai mengakarnya berbagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang dilakukan di tingkat regional (UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, 2024). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya kerja sama kolektif yang dilakukan di tingkat regional. Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang memiliki permasalahan kompleks dalam isu-isu kejahatan transnasional.



Gambar 1.1 Persebaran Penipuan Daring dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Sumber: INTERPOL, 2023

Berdasarkan pada gambar 1.1, INTERPOL menerbitkan laporan terkait peta persebaran penipuan daring yang menjadi modus perdagangan manusia secara global. Laporan tersebut menegaskan bahwa modus ini memanfaatkan kerentanan dunia maya sebagai bentuk perekrutan dalam perdagangan manusia. Pelaku kejahatan perdagangan manusia menyebarkan lowongan kerja yang sangat menguntungkan dengan minim persyaratan. Sehingga sebagian besar korban merasa tertarik dengan lowongan tersebut tanpa adanya perasaan mencurigakan. Saat korban telah terdorong untuk mengambil kesempatan itu, dilanjutkan dengan adanya penyelundupan secara ilegal ke negara yang dituju. Lokasi utama berawal dari Kamboja yang menjadi pusat perdagangan manusia melalui penipuan daring. Pusat perdagangan dilanjutkan ke beberapa negara seperti Laos dan Myanmar. Selain itu, di kawasan Asia Tenggara yang menjadi lokasi sekunder yaitu Tailan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Jika hal ini tidak segera diselesaikan akan berlanjut pada penyelundupan imigran secara

global. Sekretaris Jenderal INTERPOL menegaskan bahwa ancaman yang berawal dari regional telah menjadi krisis perdagangan manusia global (INTERPOL, 2023).

Negara Asia Tenggara yang menjadi lokasi utama dan dua negara di lokasi sekunder yang mencakup Kamboja, Laos, Myanmar, Tailan, dan Vietnam merujuk pada kawasan Sungai Mekong. Sungai Mekong menjadi salah satu sungai yang memiliki sistem sungai kompleks dan panjang. Hulu Sungai Mekong berada di Yunnan (China), yang mengalir melalui Myanmar, lalu ke Vietnam, Laos, Tailan, hingga Kamboja. Faktor terbesar yang menjadi pendorong kasus perdagangan manusia ini yaitu adanya kesenjangan ekonomi dari setiap negara. Migrasi secara legal maupun ilegal dilakukan oleh negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang sebagai pendorong dalam mencari pekerjaan di luar negeri (Zahra et al., 2024).

Hal tersebut juga diikuti dengan beberapa faktor seperti kekurangan tenaga kerja di negara tujuan, hubungan geografis yang berdekatan, dan jaringan migrasi yang terhubung. Sebelum adanya modus penipuan daring, masalah migrasi tersebut yang berdampak pada kasus perdagangan manusia di kawasan tersebut. Dari setiap negara di Sungai Mekong, Tailan dan Yunnan yang menjadi kawasan industrial daripada negara lain. Tailan menjadi negara yang unggul dalam pembangunan ekonomi, sehingga menjadi negara tujuan utama perdagangan manusia. Mayoritas imigran berasal dari negara tetangga yang meliputi Laos, Kamboja, dan Myanmar (Zahra et al., 2024). Kawasan Sungai Mekong juga memiliki keterbatasan pada

legalitas dan keamanan jalur migran yang masuk. Migrasi yang masuk secara tidak resmi menciptakan peluang bagi perdagangan dan eksploitasi migran (World Vision, 2014). Sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi penyebab negara-negara di Kawasan Sungai Mekong menjadi penyumbang kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Negara Kawasan Sungai Mekong

Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Myanmar	358	167	29	53	82
Kamboja	207	348	370	600	354
Tailan	1.541	155	190	295	701
Vietnam	175	110	77	90	147
Laos	32	21	39	39	45

Sumber: *Country Data UNODC dan United States Department of State's*

Tabel jumlah kasus perdagangan manusia pada periode tahun 2019 hingga 2023 menjelaskan berbagai total kasus yang berbeda-beda dari setiap negara di Sungai Mekong. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai aspek dari setiap negara. Peningkatan maupun penurunan kasus perdagangan manusia bergantung pada bagaimana pemerintah nasional berupaya untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di negaranya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara masing-masing tentu memiliki kapasitas yang berfokus di tingkat nasional. Sedangkan permasalahan perdagangan manusia menjadi bentuk kejahatan transnasional lintas batas yang akan

berdampak pada negara tetangga di kawasan regional. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya peran atau upaya yang dilakukan di tingkat regional.

ASEAN sebagai organisasi tingkat regional memiliki peran penting di wilayah Asia Tenggara dalam menyelesaikan permasalahan yang mulai meluas antar perbatasan. ASEAN juga memprioritaskan upayanya untuk memerangi perdagangan manusia dengan membentuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC)* yang disahkan pada tahun 2015. ACTIP-WC menjadi dasar untuk setiap negara anggota ASEAN dalam pencegahan, investigasi, hingga pada penuntutan kasus perdagangan manusia (ASEAN-Australia Counter Trafficking, 2024). Selain itu terdapat upaya pembentukan badan ASEAN berupa *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* yang dibentuk dengan berlandaskan komitmen ASEAN dalam memenuhi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap negara anggota. Tidak hanya itu ASEAN juga membentuk *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of Women and Children (ACWC)*. Komisi tersebut dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap wanita dan anak yang sebagian besar menjadi korban dari berbagai kejahatan transnasional (Afriansyah et al., 2022). Namun tanpa adanya dukungan dari aktor eksternal, ASEAN belum bisa menyelesaikan perdagangan manusia secara menyeluruh. Hal ini karena adanya kekurangan kapasitas pada badan ASEAN yang berfokus pada isu perdagangan manusia. Seperti adanya kekurangan dalam pendanaan untuk program ASEAN dan negara anggota. Selain itu terdapat

kekurangan pada sistem pemantauan dan evaluasi dari setiap negara anggota (ASEAN Secretariat, 2022).

Aktor eksternal yang telah mendukung ASEAN secara keseluruhan adalah Australia. Australia melanjutkan kerja sama di tingkat regional khususnya di Asia Tenggara dalam mengatasi perdagangan manusia. Pemerintah Australia juga menyatakan bahwa “*Southeast Asia will be the Principal focus of Australia’s engagement.*” Pernyataan tersebut juga diikuti dengan komitmen Australia yang berupaya penuh untuk menjadi pemimpin regional dalam mengatasi perdagangan manusia (Australian Government, 2020). Komitmen ini dibuktikan dan diawali oleh Australia dengan menjadi *co-chaired* dalam forum regional pada *Bali Process Working Group on Trafficking in Persons* (Australian Government, 2015). Selain itu, menurut peta persebaran yang dilaporkan oleh INTERPOL, Australia akan turut terdampak jika isu perdagangan manusia ini tidak segera diselesaikan. Sehingga Australia berkomitmen penuh dalam mendukung badan-badan ASEAN dan negara anggota ASEAN, untuk stabilitas keamanan regional.

Komitmen Australia dilakukan dengan menjalin kerja sama tingkat regional bersama ASEAN melalui berbagai investasi dan upaya. Berawal dari proses investasi yang pertama yaitu *Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking* (ARCPPT) tahun 2003 hingga 2006. Dilanjutkan dengan keterlibatan Australia yang membentuk *Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons* (AAPTIP) dari tahun 2013 hingga 2018. AAPTIP telah berhasil memfasilitasi pembangunan

kapasitas lintas wilayah yang mendukung implementasi ACTIP. Proses keterlibatan Australia dilanjutkan dengan investasi pada ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dengan jumlah 80 juta AUD. investasi dalam kerja sama tersebut berlangsung pada tahun 2018 hingga 2028 (Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2018). Investasi tersebut digunakan untuk pengembangan kapasitas lanjutan untuk negara-negara anggota di ASEAN. Pengembangan kapasitas tersebut dilakukan oleh Australia untuk menunjukkan dukungan dan komitmennya sebagai aktor eksternal pada kerja sama tingkat regional.

Menurut jurnal “Upaya ASEAN dalam Menangani Human Trafficking di Regional ASEAN (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)” ASEAN memiliki peran penting dalam menyusun kerangka untuk mengatasi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan kerja sama antara ASEAN bersama dalam pembuatan konvensi bernama *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP-WC) pada tahun 2015. Konvensi ini menjadi dasar ASEAN untuk memberantas permasalahan yang cukup mengakar di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan teori *transnational organized crime*. Teori tersebut digunakan untuk mengkategorikan perdagangan manusia ke dalam kejahatan transnasional terorganisir. Selain itu, penelitian ini juga mengusung konsep *human security* yang memberikan penjelasan mengenai perlindungan yang diberikan kepada seluruh individu. Dan juga menjadi

dasar yang harus diperhatikan ASEAN dalam melindungi korban perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara (Afriansyah et al., 2022).

Selanjutnya pada penelitian yang berjudul “*Analyzing the Role of Mekong Sub Regional States in Combating Human Trafficking in Cambodia: A Human Security Perspective*” menjelaskan terkait kompleksitas kondisi Kamboja yang berakibat pada kasus perdagangan manusia. Krisis multidimensi yang dialami oleh Kamboja menjadi faktor pendorong peningkatan perdagangan manusia. Kerja sama regional antara subwilayah Mekong yang mencakup Tailan, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja memiliki peran penting dalam kesepakatan, kebijakan, hingga program kolaboratif. Penelitian ini menggunakan analisis melalui sudut pandang keamanan manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penyelesaian masalah perdagangan manusia dengan ASEAN dan negara-negara wilayah Mekong harus melanjutkan pendekatan yang komprehensif. Dengan memberikan prioritas penuh melalui pendekatan *people-centered* yang sejalan dengan tujuan bersama dalam proses pembangunan berkelanjutan (Maudina et al., 2025).

Terdapat penelitian terbaru yang berjudul “Implementasi Kerja sama ASEAN-Australia untuk Menanggulangi *Human Trafficking* di Tailan Tahun 2019-2024” menjelaskan terkait kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN dan Australia dalam mengatasi perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan fokus pada wilayah Tailan tahun 2019 hingga 2024. Unit analisis yang digunakan yaitu *regional cooperation and external actors* yang memiliki unit eksplanasi berupa

bantuan dana, dukungan politik, dan sumber daya teknis (Fitri, 2025). Penelitian ini memiliki celah yaitu fokus pembahasan hanya pada wilayah Tailan. Sedangkan masih belum ada yang melakukan penelitian dengan fokus pada wilayah Sungai Mekong sebagai penyumbang terbesar kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan ASEAN dan Australia dalam mengatasi isu perdagangan manusia pada kawasan Sungai Mekong tahun 2019 hingga 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi kerja sama antara ASEAN dan Australia untuk menanggulangi *Human Trafficking* di Kawasan Wilayah Sungai Mekong melalui

program *Asean-Australia Counter Trafficking* yang dimulai pada tahun 2019 sampai 2024.

1.4 Kerangka Teori/Konsep

1.4.1 Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia diartikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan lintas batas negara yang meliputi berbagai bentuk eksploitasi kepada korban. Perdagangan manusia seringkali didasari dengan motivasi ekonomi sehingga membentuk sebuah jaringan yang menghubungkan berbagai negara. Atas dasar itu, perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dengan jangkauan yang sangat luas. Menurut data, banyak korban perdagangan manusia yaitu perempuan yang dipaksa untuk dijadikan budak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Tidak hanya itu anak-anak juga dijadikan sebagai pekerja paksa dengan upah yang sangat tidak layak (Shelley, 2010).

Terdapat banyak perdagangan manusia yang memiliki jaringan luas, sehingga para pelaku kejahatan dapat menjual secara berulang-ulang ke negara tujuan. Permasalahan yang sangat terlihat yaitu angka permintaan dan penawaran dalam perdagangan manusia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam untuk menangani perdagangan manusia. Perdagangan manusia memiliki komoditas yang dapat dieksploitasi berkali-kali, berbeda dengan perdagangan narkoba yang hanya dapat diperdagangkan

hanya sekali. Jenis perdagangan manusia yang dapat dieksploitasi secara berkali-kali yaitu eksploitasi tenaga kerja, menjual perempuan sebagai budak seks, dan eksploitasi anak dalam konten dewasa yang dijual pada beberapa pembeli. Selain itu juga terdapat beberapa penjualan yang hanya dilakukan sekali seperti penjualan organ tubuh dan anak untuk diadopsi (Shelley, 2010). Kasus perdagangan manusia dengan skala yang besar tentu memerlukan adanya upaya secara kolektif yang dilakukan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama di tingkat bilateral maupun multilateral. Beberapa inisiatif juga dilakukan melalui kerja sama regional dengan menemukan keselarasan perspektif antara negara anggota dalam mengatasi perdagangan manusia (Atmasasmita, 2021).

1.4.2 Regional Cooperation and External Actors

Kawasan regional menjadi arena dalam kerja sama dan konflik yang dapat diciptakan secara signifikan. Tata kelola tersebut seringkali dikaitkan dengan beberapa struktur yang muncul dari keamanan aktor yang berdekatan secara geografis. Pada keamanan regional, aktor eksternal yang memiliki pengaruh dapat terlibat dalam pembentukan struktur keamanan suatu kawasan. Sehingga aktor eksternal memiliki kapasitas dan berperan penting dalam pembentukan ulang struktur regional (Klose, 2018). Dukungan dari aktor eksternal sangat dibutuhkan dalam keselarasan kerja sama dalam tatanan regional. Kekuatan eksternal memiliki pendekatan yang berbeda-beda, seperti adanya kepentingan dari aktor tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi proses melalui bantuan dana dan

politik. Selain itu pendekatan aktor eksternal juga dapat dipengaruhi oleh ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan aktor tersebut. Hal ini dapat mendorong kekuatan eksternal untuk berupaya menyatukan kekuatan regional dalam melawan musuh bersama (Wasi, 2013).

Upaya yang dapat dilakukan oleh aktor eksternal dapat dilakukan melalui dukungan politik, bantuan dana, dan sumber daya teknis. Aktor eksternal memberikan bantuan dana, pinjaman, investasi, sumber daya teknis serta dukungan politik untuk mendukung program-program pembangunan regional dan memperkuat institusi regional. Bantuan dana yang diberikan dapat berupa program yang disponsori oleh suatu negara, kebutuhan finansial menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembentukan institusi kerja sama regional. Dalam dukungan politik, aktor eksternal memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Sumber daya teknis yang diberikan oleh aktor eksternal berupa tenaga ahli atau profesional yang dihadirkan untuk memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan rehabilitasi korban. Tenaga ahli yang diberikan juga bertujuan untuk memperkuat institusi hukum, mendukung sistem peradilan dan mendampingi pelaksanaan kebijakan regional (Wasi, 2013).

1.5 Sintesa Pemikiran



1.6 Argumentasi Utama

ASEAN sebagai aktor regional yang memiliki komitmen penuh dalam mengatasi perdagangan manusia seringkali mendapat hambatan di kawasannya. Dalam hal ini, ASEAN membutuhkan dukungan dari aktor eksternal. Seperti Australia yang sebagai aktor eksternal, dengan dukungannya melalui ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT). Kerjasama tersebut mendukung penuh negara-negara anggota, dalam bentuk bantuan dana, dukungan politik, dan sumber daya teknis. Bantuan dana yang dilakukan melalui ASEAN-ACT melalui alokasi dana selama 10 tahun yaitu periode 2018 hingga 2028 sebesar 80 juta AUD. Bantuan dana tersebut dialokasikan melalui komite program nasional di Kamboja, Laos, Filipina, Tailan, dan Vietnam. Namun terdapat pengecualian pada

Myanmar karena kondisi latar belakang politik internal. Tidak hanya melalui komite nasional setiap negara, bantuan tersebut dialokasikan juga melalui berbagai organisasi non-pemerintah yang ada di negara anggota. Organisasi non-pemerintah tersebut meliputi Legal Support for Children and Women (LSCW) dari Kamboja, The Human Rights and Development Foundation (HRDF) dan Social Responsibility Law Office (SR Law) dari Tailan, serta Blue Dragon Children's Foundation dari Vietnam.

Dukungan politik yang dilakukan oleh ASEAN-ACT melalui tingkat regional dengan mendukung ASEAN dalam melakukan pengembangan kebijakan baru tentang perlindungan migran. Selain itu, mendukung ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) tahun 2024 untuk membentuk kerangka kerja pemantauan dan evaluasi Bohol TIP Work Plan 2.0. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat regional, namun dilanjutkan di tingkat nasional. Seperti ASEAN-ACT yang mendukung Tailan dalam mengembangkan Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence yang berfokus pada korban dan kerentanan gender. Selain itu, mendukung Kamboja dalam proses penanganan perdagangan manusia.

Bentuk yang terakhir yaitu sumber daya teknis yang dilakukan oleh ASEAN-ACT dengan memberikan berbagai fasilitas dan pelatihan teknis. The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) didukung untuk memberikan pelatihan bagi responden garis depan dalam mengatasi perdagangan manusia dan berpusat pada korban dan kerentanan gender. Di tingkat nasional, ASEAN-ACT juga mendukung Tailan untuk mengadakan

konferensi terkait perbudakan modern dengan mengajak berbagai pemangku kepentingan. Dukungan di Kamboja diberikan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas petugas garis depan. Sedangkan di Laos, ASEAN-ACT melakukan kerja sama dengan Lao Women's Union untuk melakukan *workshop* yang mendukung dan proteksi pada korban. Vietnam juga didukung melalui The Vietnam Women's Union (VWU) sebagai petugas garis depan dalam mendukung korban perempuan pada perdagangan manusia.

Namun, setiap proses di setiap negara pada kawasan Sungai Mekong memiliki hasil yang berbeda. Karena memiliki latar belakang dan karakteristik termasuk komitmen setiap negara yang berbeda-beda. Berdasarkan evaluasi, bantuan dana, dukungan politik dan bantuan teknis yang diberikan melalui ASEAN ACT relevan dengan ACTIP sehingga Pemerintah Australia sebagai aktor eksternal berencana melanjutkan bantuan yang diberikan di Asia Tenggara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam mengenai suatu fenomena dengan sudut pandang menyeluruh dan terperinci. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menjawab pertanyaan dengan

menjelaskan satu variabel tanpa adanya hubungan kausalitas (Purbantina & Perbawani, 2023).

Tipe penelitian deskriptif, digunakan untuk menjawab mengenai bentuk implementasi yang dilakukan oleh ASEAN. Hal tersebut karena, penulis berfokus untuk menggambarkan secara mendalam mengenai kondisi implementasi kerja sama yang telah dilakukan oleh ASEAN dan Australia di Wilayah Sungai Mekong dalam mengatasi perdagangan manusia. Metode penelitian ini juga mempertimbangkan keakuratan sumber yang diambil untuk melihat fenomena tersebut secara tepat.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini dengan menjelaskan bentuk implementasi dari sudut pandang ASEAN sebagai organisasi regional yang melakukan kerja sama dengan Australia dalam mengatasi perdagangan manusia. Penelitian ini, juga membatasi analisis dengan berfokus pada salah satu teori yang sesuai dengan fenomena ini. Selain itu, penulis membatasi penelitian dari tahun 2019 hingga 2024 dengan justifikasi bahwa ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dimulai sejak 2018 dan mulai efektif di tahun 2019. Selain itu, penelitian ini berhenti pada tahun 2024 karena menyesuaikan data terbaru yang dikeluarkan oleh ASEAN-ACT. Negara-negara pada Sungai Mekong dalam penelitian ini berfokus pada kawasan Asia Tenggara yang meliputi Tailan, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Meskipun Yunnan menjadi hulu Sungai Mekong, provinsi China tersebut

tidak termasuk ke dalam tanggung jawab ASEAN dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan bentuk analisis dokumen. Data sekunder yaitu diartikan sebagai, pengambilan data yang diambil oleh peneliti sebelumnya yang ditujukan untuk pembaruan dalam penelitian. Penulis menggunakan data sekunder untuk melanjutkan serta menemukan justifikasi yang dapat memperkuat penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam pengumpulan data sekunder dibutuhkan adanya analisis secara mendalam mengenai dokumen-dokumen yang sebagian besar berbentuk jurnal dan buku. Hal tersebut ditujukan untuk memperdalam pemahaman dan juga mengembangkan pengetahuan dengan penafsiran penulis (Bowen, 2009). Data penelitian diambil melalui laman resmi *Department Foreign Affairs and Trade* Australia yang mencakup alokasi dan ASEAN-ACT, dukungan politik, dan sumber daya teknis yang diberikan. Data sekunder pendukung meliputi laporan nasional yang diterbitkan oleh setiap negara dan laporan yang diterbitkan oleh *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bermitra.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian deskriptif, teknik analisis data yang digunakan yaitu berbentuk kualitatif yang menganalisis aspek-aspek secara menyeluruh terhadap fenomena yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis berupaya

untuk menggambarkan hingga menjelaskan konstruksi sosial yang valid (Sugiyono, 2013). Penelitian ini juga mengambil studi kasus sebagai teknik analisa data, yang diartikan sebagai penjelasan mendalam secara rinci dari kasus yang telah diambil (E-International Relations, 2021).

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: Mencakup pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metode penelitian..

BAB 2: Pada bab ini menjelaskan hasil analisis mengenai karakteristik serta latar belakang negara-negara Sungai Mekong dan implementasi kerja sama Australia di ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia di Wilayah Sungai Mekong dalam bentuk bantuan dana.

BAB 3: Pada bab ini menjelaskan hasil analisis mengenai implementasi implementasi kerja sama ASEAN dan Australia dalam mengatasi perdagangan manusia di Wilayah Sungai Mekong dalam bentuk dukungan politik dan sumber daya teknis.

BAB 4: Pada bab ini berisikan hasil ringkasan yang secara singkat dan jelas ke dalam bagian kesimpulan.